

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦑꦠꦤꦶꦩꦠꦱꦺꦛꦠꦤꦺꦤꦸꦫꦺꦗꦂꦏꦺꦏꦺꦩꦠꦤꦺꦤꦸꦫꦺꦗꦂꦏꦺ

Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 564544

Website : <http://www.bпка.jogjaprov.go.id>. email : bпка@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Nomor : 700.1.2.14 / 5503
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Pengendalian Gratifikasi,
Pengungkapan Dugaan Pelanggaran
Benturan Kepentingan dan Kejadian
Risiko/Risk Event, Pelaksanaan
atas RTP, Respon terhadap Risiko
Kecurangan dan Laporan SPBE
di lingkungan BPKA DIY Triwulan II 2024

Kepada :
Yth. Inspektur DIY
di -
YOGYAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 700.1.1.1/71 perihal Permintaan Laporan Pengendalian Gratifikasi, Pengungkapan Dugaan Pelanggaran, Benturan Kepentingan dan Kejadian Risiko/Risk Event, Pelaksanaan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Respon terhadap Risiko Kecurangan dan Laporan SPBE di Lingkungan Perangkat Daerah pada Triwulan II, bersama ini kami sampaikan Laporan sebagaimana tersebut di atas di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024 dengan data sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA,

WIYOS SANTOSO, SE.,M.Acc.
NIP. XXXXXXXXXXXX

Lampiran Surat

Nomor : 700.1.2.14 /5503

Tanggal : 10 Juli 2024

1. Laporan Pengendalian Gratifikasi BPKA DIY (Triwulan II 2024)

No.	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
	NIHIL			

2. Laporan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran BPKA DIY (Triwulan II 2024)

No.	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
	NIHIL			

3. Laporan Benturan Kepentingan BPKA DIY (Triwulan II 2024)

No.	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
	NIHIL			

4. Laporan Kejadian Risiko/Risk Event BPKA DIY (Triwulan II 2024)

No.	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
	NIHIL			

5. a. Pelaksanaan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	Rekening belanja tidak tepat, angkas tidak sesuai dengan kebutuhan riil	Melakukan penelaahan rekening yang tidak sesuai dan selanjutnya membuat usulan revisi/pergeseran DPA berikut angkas	menyiapkan usulan revisi/pergeseran DPA dan angkasnya	Mei 2024
2	1. data kinerja yang ada di aplikasi belum yang ter-update 2. skor penilaian kinerja kurang optimal	Melakukan entri data sesuai dengan data terkini	Entri data monev kinerja dilakukan secara kontinyu dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak internal BPKA agar penilaian kinerja instansi optimal	April s.d Juni 2024
3	Ketidaktepatan dalam Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan PPPK DIY	Penyiap Gaji dari KPPD DIY di Kabupaten/Kota harus lebih teliti dan cermat dalam membuat laporan data ASN dan PPPK DIY yang ada tiap bulannya	Penyiap gaji berkoordinasi dengan petugas kepegawaian terkait kenaikan pangkat/golongan, kenaikan gaji berkala, data pensiun, data mutasi dll.	April s.d Juni 2024
4	Penyelesaian administrasi honor Petugas Penatausahaan terhambat	Koordinasi dengan Bidang-bidang dan KPPD DIY di Kabupaten/Kota	Melaksanakan rapat koordinasi dengan PUMK Bidang dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran KPPD	April s.d Juni 2024

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
5	Pelaporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran tidak tepat waktu	1) Perlunya pendampingan bagi petugas akuntansi yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam pembuatan laporan keuangan 2) Perlunya Koordinasi secara berkala antara Petugas Akuntansi, Bendahara (penerimaan dan pengeluaran), Pengurus Barang (Aset dan Persediaan)	Petugas Akuntansi berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bendahara (penerimaan dan pengeluaran), Pengurus Barang (Aset dan Persediaan).	April s.d Juni 2024
6	Pelaporan Barang Milik Daerah tidak tersusun tepat waktu	Perlunya pendampingan bagi pengurus barang yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam pembuatan laporan BMD	Pengurus Barang selalu mengikuti pendampingan yang diadakan oleh Bid. PBMD	April s.d Juni 2024
7	Terdapat pelanggaran peraturan kepegawaian oleh ASN dan PPPK DIY di lingkungan BPKA DIY	Melakukan pembinaan kepegawaian secara rutin, berjenjang dan menyeluruh kepada seluruh ASN dan PPPK DIY	Dengan melaksanakan Sosialisasi Whistle Blowing System dan Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya Mitigasi Korupsi kepada seluruh ASN dan PPPK DIY.	Mei 2024
8	Kerusakan dan tidak berfungsinya peralatan komponen listrik di luar yang sudah direncanakan	Mengidentifikasi lokasi ketidakstabilan aliran listrik yang dapat mengakibatkan kerusakan komponen listrik, serta segera memperbaikinya.	Mengidentifikasi bersama dengan Biro Umum dan rekanan agar segera diketahui titik ketidakstabilan listrik	April s.d Juni 2024
9	APAR tidak berfungsi secara maksimal untuk antisipasi dini apabila terdapat darurat kebakaran.	Melakukan pengecekan berkala kesiapan APAR dan melakukan pengisian sesuai rencana, menyesuaikan jenis APAR yang tepat untuk antisipasi terjadinya kebakaran di ruangan indoor, serta memberikan petunjuk penggunaan APAR	Pengecekan secara berkala (1 bulan sekali) oleh para Pengurus Barang dibantu dengan Cleaning service masing-masing bidang	April s.d Juni 2024
10	Kekurangtersediaannya peralatan rumah tangga	Melakukan inventarisasi peralatan rumah tangga dengan lebih cermat yang perlu diadakan pada tahun n-1 untuk penganggaran tahun depannya.	Mengidentifikasi peralatan/perengkapan rumah tangga yang masih belum terpenuhi secara lengkap, dibantu oleh Cleaning Service masing-masing Bidang	April s.d Juni 2024
11	Kekurangtersediaannya barang cetakan terutama kotak arsip	Koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka pemindahan arsip ke depo arsip secara kontinyu dan memastikan adanya ketersediaan stok, terutama kotak arsip	Melaksanakan pemindahan arsip ke depo arsip secara bertahap, serta melakukan pengadaan kotak arsip	Juni 2024
12	Bahan Bacaan sering tidak terbaca oleh para pegawai	Mengingatkan bidang-bidang untuk memanfaatkan informasi dari bahan bacaan terbitan agar mendapatkan update berita, apalagi informasi terkait dengan output kinerja instansi	Mengingatkan bidang-bidang apabila ada berita penting di media massa terbitan, agar dilakukan pendokumentasian	April s.d Juni 2024

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
13	Kebutuhan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi melebihi anggaran yang tersedia. Apalagi di Triwulan akhir semakin banyak tamu dari luar daerah yang melakukan kunjungan kerja ke BPKA DIY	1) Pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat dilakukan seefisien mungkin, dengan berdasarkan skala prioritas yang merupakan tindak lanjut kebijakan pemda maupun pemerintah pusat. 2) Memperbanyak pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat melalui media daring.	Menghimbau kepada bidang-bidang untuk memaksimalkan rapat melalui zoom meeting.	April s.d Juni 2024
14	1) Penatausahaan arsip dinamis belum dapat dilaksanakan dengan optimal dengan semakin banyaknya volume arsip, sehingga arsip susah dicari kembali 2) Banyaknya arsip yang terkena hama rayap. 3) Hama Tikus pada ruangan kantor sangat mengganggu dan membahayakan kesehatan	1) Koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka melaksanakan penatausahaan kearsipan supaya mudah dalam pemilahan arsip dan dalam pencarian kembali berkas arsip 2) Mengedepankan pemeliharaan arsip lewat fungigasi untuk menjaga keamanan arsip dari kerusakan. 3) Menganggarkan secara rutin penanganan/pengendalian hama tikus secara menyeluruh di lingkungan kantor.	Mengkoordinasikan dengan seluruh Petugas Arsip Bidang untuk pelaksanaan pemindahan arsip ke depo arsip secara bertahap Melaksanakan pengendalian hama tikus di seluruh ruangan BPKA Induk	- Juni 2024 - April s.d Juni 2024
15	Adanya surat masuk atau surat keluar yang tidak tersampaikan	1) Melaksanakan bimtek/komunitas belajar terhadap teknis penggunaan Aplikasi Srikandi dan Sisminkada E-office. 2) Menghimbau seluruh pegawai untuk rajin memantau akun Aplikasi Srikandi dan Sisminkada E-office masing-masing secara berkala.	Melaksanakan koordinasi terkait penggunaan Aplikasi Srikandi di lingkungan BPKA DIY (kendala dan solusinya)	Mei 2024
16	Kebutuhan riil pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik melebihi anggaran yang tersedia	Memastikan penyediaan dana jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik cukup, dengan membuat kendali atas penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Pembayaran listrik, air, telepon dan internet secara tepat waktu, serta pengadaan layanan VPN	April s.d Juni 2024
17	1) Pengharum ruangan yang sudah habis tidak segera terisi kembali 2. Tanaman yang disewa menjadi kurang terpelihara dengan baik, sehingga kurang estetik untuk dipandang. 3. Mesin fotokopi yang disewa sering mengalami masalah pengandaan.	Melakukan pengawasan terhadap sewa pengharum, tanaman, dan penggunaan mesin fotokopi.	Menghubungi pihak rekanan agar : - melakukan penggantian refill pengharum ruangan apabila sudah habis - melakukan penggantian tanaman, apabila tanaman dirasa sudah kurang terawat. - melakukan maintenance apabila ada kendala teknis mesin fotocopi	April s.d Juni 2024
18	Tidak terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan oleh Penyedia	Lebih berhati-hati dalam memilih Penyedia Jasa Tenaga Kebersihan dan Keamanan, dengan memperhatikan rekomendasi dari BLP	Memantau pembayaran BPJS cleaning service dan petugas keamanan oleh penyedia jasa.	Mei 2024

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
19	Kerusakan dan tidak berfungsinya kendaraan dinas/operasional di luar yang telah diperkirakan	Membuat kartu kendali terhadap pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	melaksanakan pemeliharaan terhadap kendaraan operasional sesuai dengan keluhan pemakaian anggaran kas	Mei s.d Juni 2024
20	Terdapat peralatan dan mesin yang tidak mendapat pemeliharaan	Membuat kartu kendali terhadap pemeliharaan peralatan dan mesin	Pemeliharaan peralatan dan mesin dilaksanakan sesuai dengan kartu kendali dan anggaran kas	April s.d Juni 2024
21	Usia gedung yang sudah relatif tua menjadikan gedung mudah mengalami kerusakan pada fasilitas umum.	Melakukan identifikasi kerusakan dan potensi kerusakan agar dapat direhabilitasi secara menyeluruh sehingga fasilitas dapat berfungsi dan tidak mengganggu kinerja instansi	Melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan identifikasi kerusakan dan dilaksanakan sesuai anggaran kas	Mei s.d Juni 2024
22	Terlambat di dalam penyaluran ke kab/kota	Peningkatan kemampuan SDM dan jalinan koordinasi yang baik antara para pihak yang terkait.	Melakukan koordinasi dengan Bid. Anggaran Belanja, Anggaran Pendapatan dan Pemerintah Kab/Kota	April s.d Juni 2024
23	Penyusunan KUA dan PPAS tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	Mengoptimalkan proses perencanaan sedari awal yaitu pada proses RKPD sehingga dalam penyusunan KUA dan PPAS tidak ada perubahan dan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	Rancangan KUA TA.2025 telah berpedoman pada RKPD Tahun 2025. Dalam penyusunan rancangan KUA memuat substansi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya rancangan PPAS memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan subkegiatan. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan peraturan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta dilaksanakan melalui SIPD-RI.	Mei-Juli 2024

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
41	RKBMD disusun belum sesuai kebutuhan yang sebenarnya.	Melaksanakan Koordinasi dan Penelaahan atas usulan RKBMD OPD dengan mengacu pada Renja OPD dan memperhatikan kebutuhan barang dan ketersediaan barang ada dengan mengacu pada standar barang; standar kebutuhan; dan/atau standar harga.	Melaksanakan Koordinasi dan Penelaahan atas usulan RKBMD OPD dengan mengacu pada Renja OPD dan memperhatikan kebutuhan barang dan ketersediaan barang ada dengan mengacu pada standar barang; standar kebutuhan; dan/atau standar harga.	Januari s.d. Desember 2024
42	Data Aset Tetap dan Persediaan yang disajikan selalu berubah-ubah.	Secara rutin melaksanakan updating data BMD melalui pendampingan Aplikasi dan rapat rekonsiliasi secara daring/luring dengan Pengurus Barang OPD dalam rangka ketepatan/keakuratan penyajian data pelaporan barang pengguna triwulan, semester dan tahunan	Secara rutin melaksanakan updating data BMD melalui pendampingan operasionalisasi Aplikasi Aset dan Aplikasi Persediaan, Secara rutin melaksanakan rekonsiliasi laporan BMD melalui rapat rekonsiliasi bersama dengan OPD	Januari s.d. Desember 2024
43	- Tanah dan Bangunan milik Pemda DIY yang status kepemilikannya belum sah dalam hal ini sertifikat	- Pelaksanaan kontrol dan proses sertifikasi terhadap tanah pemda DIY	- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pensertifikatan (Kantor Pertanahan) untuk monitoring pelaksanaan pensertifikatan tanah.	Januari s.d. Desember 2024
44	- Gedung Kantor yang tidak termonitor secara rutin berdampak terhadap kenyamanan dan keamanan kdalam penggunaan	- Pelaksanaan kontrol dan penilaian kondisi bangunan rumah dinas oleh instansi yang berwenang untuk menentukan langkah pengamanan pemeliharaan bangunan	- Monitoring dan koordinasi berkala untuk memastikan kondisi bangunan gedung kantor	Januari s.d. Desember 2024
45	- Kondisi bangunan yang rentan kerusakan karena faktor umur konstruksi	- Pelaksanaan kontrol dan penilaian kondisi bangunan rumah dinas oleh instansi yang berwenang untuk menentukan langkah pengamanan pemeliharaan bangunan rumah dinas	- Monitoring berkala terhadap BMD Bangunan idle untuk pemantauan kondisi bangunan; '- Penyediaan tenaga penjaga keamanan pada bangunan-bangunan idle Pemda DIY untuk memastikan pengamanan BMD	Januari s.d. Desember 2024
46	kerusakan BMD atau kehilangan BMD	Konsisten dalam Menyediakan Asuransi BMD untuk kendaraan dinas roda empat dan Bangunan Gedung Pemerintah	- Melaksanakan penyediaan jasa asuransi untuk BMD Bangunan Pemda DIY; '- Melaksanakan penyediaan jasa asuransi untuk BMD kendaraan dinas Pemda DIY	- Mei s.d. Juni 2024; - Mei s.d. Juni 2024
47	- Pemanfaatan barang milik daerah tidak optimal	- Dilaksanakan koordinasi dengan OPD di Pemda DIY terkait optimalisasi aset pada OPD dan Pengelolaan BMD agar lebih berdaya guna dan bermanfaat serta penilaian ulang terhadap BMD	- Melaksanakan identifikasi terhadap BMD idle yang dilaksanakan pemanfaatan untuk memastikan nilai wajar dalam rangka pemanfaatan BMD; '- Koordinasi dengan OPD Pengguna untuk mendapatkan masukan terhadap kebutuhan appraisal BMD di OPD	Januari s.d. Desember 2024

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
			Pengguna yang akan dilakukan pemanfaatan	
48	Barang Milik Daerah yang tidak laku dalam proses penjualan	Melakukan penilaian ulang terhadap BMD yang tidak laku dalam proses penjualan.	- Melakukan cek lapangan terkait BMD yang tidak laku terjual - Melakukan penilaian ulang	April - Juni 2024
49	Hasil penilaian BMD yang dilaksanakan oleh Penilai Publik/KJPP dimungkinkan lebih tinggi dari daya beli masyarakat/calon pembeli	Mendampingi dan memberikan masukan pada saat proses penilaian oleh Penilai Publik/KJPP. Faktor eksternal seperti kondisi lingkungan, biaya bongkar dan kondisi perekonomian, untuk dapat dipertimbangkan.	- Melakukan cek lapangan bersama-sama dengan KJPP dan memberikan masukan terkait faktor-faktor apa saja yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan harga	April - Mei 2024
50	BMD yang dilakukan pemindahtangan/penjualan jumlahnya terbatas, tergantung usulan dari OPD	Mengidentifikasi rencana usulan penghapusan BMD seawal mungkin	- Melakukan cek surat usulan penghapusan BMD dan mengelompokkannya berdasarkan jenis barang	April - Juni 2024
51	Kesalahan penghitungan gaji yang menyebabkan kelebihan/kekurangan perhitungan potongan fihak ketiga	Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Taspen, BPJS Kesehatan	1) Membahas usulan pergeseran anggaran dan anggaran kas yang diajukan oleh SKPD atas hasil pencermatan yang telah dilakukan. 2) Menyiapkan surat persetujuan pergeseran anggaran 3) Menyampaikan nota dinas hasil persetujuan pergeseran anggaran sebagai bahan pertimbangan perubahan penjabaran APBD	April s.d. Juni 2024
52	Terjadinya selisih data penerimaan dan pengeluaran kas dari rekening kas daerah serta pemungutan dan pemotongan SP2D	Koordinasi jg dilakukan bersama Bank BPD untuk lebih efektif menyamakan pengelompokan data	1) Melakukan penyesuaian perhitungan gaji Mei s/d Juli tahun 2024 pada aplikasi gaji 2) Melakukan koordinasi dengan Taspen dan BPJS Kesehatan untuk pemotongan dan penyetoran IWP 1%, Iuran 4% dan IWP 8% bulan April, Mei dan Juni 2024. 3) Melakukan koordinasi dengan KPPN dan SKPD untuk melakukan reklas atas kesalahan kode MAP penyetoran PFK yang ada.	April s.d. Juni 2024
53	Penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak tercatat	Membuat pencatatan manual sampai dengan aplikasi menyediakan fitur yang dibutuhkan dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas	1) Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran bulan Maret, April dan Mei dengan BPD.	April s.d. Juni 2024

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
54	Pengelolaan keuangan daerah tidak efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah - Mengikutsertakan narasumber dari Kemendagri pada tahap penyusunan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan - Konsultasi dan koordinasi jika ada permasalahan termasuk dengan APIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan secara internal maupun eksternal dengan melibatkan instansi terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan terkait perubahan Peraturan Gubernur tentang Hibah dan Bantuan Sosial 2. Fasilitasi Draft Pergub Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah dengan Kemendagri 	<p>Bulan April, Mei dan Juni 2024</p> <p>Bulan April 2024</p>
55	Terhambatnya penyerapan APBD	Ketepatan waktu penyusunan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan	-	Dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2024
56	Nilai appraisal untuk penetapan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY tidak diperoleh	Koordinasi dengan Penyedia jasa appraisal serta Pimpinan dan Anggota DPRD DIY terkait kondisi ekonomi yang mempengaruhi transaksi sewa perumahan sebelum melaksanakan pekerjaan	-	Dilaksanakan pada triwulan III/ bulan Juli sesuai dengan anggaran kas.
57	Tindaklanjut atas Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat - Meningkatkan Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 	-	Menyesuaikan dengan tata kala penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bulan Oktober sampai dengan Desember).
58	Tindaklanjut atas Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat - Meningkatkan Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 	-	Menyesuaikan dengan tata kala penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
59	Tindaklanjut atas Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat - Meningkatkan Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan dan menyampaikan surat Kepala BPKA Nomor 100.3.2/2137 tanggal 8 Maret 2024 kepada OPD-OPD perihal Permohonan Personil Tim Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota. - Telah selesai dilaksanakannya Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 187/KEP/2024 tanggal 13 Mei 2024. - Telah selesai dilaksanakannya Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 228/KEP/2024 tanggal 14 Juni 2024. 	Bulan April, Mei dan Juni 2024
60	Pengelolaan keuangan BLUD terkendala dan tidak dapat melaksanakan fleksibilitas pola pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan BLUD dan OPD terkait lainnya - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembina BLU dan instansi terkait lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi terkait Penatausahaan Keuangan BLUD baik Pendapatan maupun Belanja 2. Dilaksanakannya penetapan 11 SMK menjadi SMK BLUD. 	Bulan Mei 2024 Bulan Juni 2024
61	Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY tidak mencapai 51% dari modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp4trilyun	<ul style="list-style-type: none"> - Ikut serta dalam mengawal perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun mendatang, untuk memastikan ketercukupan alokasi anggaran penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY. - Membuat surat edaran kepada kabupaten/kota terkait dengan pengalokasian penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY sesuai Perda yang telah ditetapkan. - Menyusun rekomendasi melalui Evaluasi APBD Kabupaten/Kota agar dilakukan penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ikut serta dalam mengawal perencanaan dan penganggaran penyertaan modal pada RKPD, khususnya pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan ketercukupan alokasi anggaran penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY. 	Bulan Mei dan Juni 2024.
62	Penurunan kinerja BUMD milik Pemda DIY	Melaksanakan rapat pembinaan triwulanan dan semesteran.	Dilaksanakannya rapat pembinaan dan evaluasi kinerja BUMD	Bulan April, Mei, Juni 2024

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
63	BUKP tidak diakui sebagai lembaga keuangan resmi	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan dan mengalokasikan anggaran audit BUKP melalui APBD DIY pada triwulan I tahun anggaran 2024. - Melaksanakan penyusunan kajian/roadmap kelembagaan BUKP pada triwulan II tahun anggaran 2022. (sudah tidak relevan dengan tahun ini) - Meningkatkan koordinasi antara Pemda DIY, Kemendagri dan OJK 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya audit Laporan Keuangan BUKP Tahun Buku 2023 - Dilaksanakan koordinasi dengan Biro Hukum, Kemendagri, OJK 	<ul style="list-style-type: none"> - Bulan Januari s.d. Mei 2024 - April, Mei, Juni
64	Kinerja BUKP tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan Peraturan Gubernur DIY tentang Sistem dan Prosedur Kredit. (sudah tidak relevan dengan tahun ini) - Menerbitkan Peraturan Gubernur DIY tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang BUKP. (sudah tidak relevan dengan tahun ini) - Meningkatkan Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan BUKP - Meningkatkan Komitmen BUKP dalam melaksanakan kegiatan operasional secara tertib, efisien, efektif serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - berkoordinasi dengan seluruh karyawan BUKP DIY agar tertib administrasi dan taat pada ketentuan yang berlaku. '- berkoordinasi dengan seluruh Kepala BUKP DIY agar meningkatkan upaya penagihan terhadap nasabah Kredit. '- membatasi pinjaman antar BUKP. '- membatasi pembelian/pengadaan inventaris. 	<ul style="list-style-type: none"> - bulan April, Mei, Juni

b. Pelaksanaan atas Respon terhadap Risiko Kecurangan

No	Deskripsi Risiko Kecurangan	Respon terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	Pembayaran tidak sesuai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Penambahan jumlah kanal pembayaran secara digital 2. Sosialisasi Ke masyarakat terkait pembayaran secara digital 	Memberikan himbauan kepada OPD Pemungut untuk dapat mengoptimalkan pembayaran melalui kanal-kanal pembayaran non tunai	dilaksanakan setiap ada pertemuan dan setiap rekonsiliasi
2	Pembayaran tidak disetorkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Penambahan jumlah kanal pembayaran secara digital 2. Sosialisasi Ke masyarakat terkait pembayaran secara digital 	Memberikan himbauan kepada OPD Pemungut untuk dapat mengoptimalkan pembayaran melalui kanal-kanal pembayaran non tunai	dilaksanakan setiap ada pertemuan dan setiap rekonsiliasi

No	Deskripsi Risiko Kecurangan	Respon terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
3	Kecurangan Penjualan Tiket/Karcis	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Penambahan jumlah kanal pembayaran secara digital Penjualan tiket dalam bentuk tiket elektronik (e-Ticketing) Sosialisasi Ke masyarakat terkait pembayaran secara digital 	Memberikan himbauan kepada OPD Pemungut untuk dapat mensosialisasikan kepada wajib retribusi terkait dengan metode pembayaran non tunai	dilaksanakan setiap ada pertemuan dan setiap rekonsiliasi
4	Suap/gratifikasi oleh pihak ketiga kepada pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja; Melaksanakan pembinaan BUMD sesuai ketentuan yang berlaku Melaksanakan sosialisasi tentang prinsip <i>good corporate governance</i> pada masing-masing BUMD. 	Mengikuti Sosialisasi yang diadakan oleh Sekretariat BPKA DIY tentang Whistle Blowing System dan pengendalian Gratifikasi dalam upaya Mitigasi Korupsi, narasumber dari forum PAK SIJI dan Inspektorat DIY	Mei 2024
5	Suap/gratifikasi oleh pihak ketiga kepada pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja; Melakukan evaluasi atas kepuasan pemangku kepentingan secara berkala dan memuat pernyataan/pertanyaan terkait praktek suap dan gratifikasi 		
6	Suap/gratifikasi oleh pihak ketiga kepada pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja; Melaksanakan pembinaan BLUD sesuai ketentuan yang berlaku 		
7	Laporan barang milik daerah yang tidak akurat	<ol style="list-style-type: none"> Menguatkan peran pengawasan internal dengan melakukan penyusunan laporan barang milik daerah secara terintegrasi dengan menggunakan aplikasi; Melakukan reviu/pengawasan intern atas laporan barang milik daerah yang disusun oleh subbid pengelola barang milik daerah; Meningkatkan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait penyusunan laporan barang milik daerah. 	Secara rutin melaksanakan updating data BMD melalui pendampingan operasionalisasi Aplikasi Aset dan Aplikasi Persediaan, Secara rutin melaksanakan rekonsiliasi laporan BMD melalui rapat rekonsiliasi bersama dengan OPD	1 TA 2024

No	Deskripsi Risiko Kecurangan	Respon terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
8	RKBMD disusun tidak sesuai kebutuhan yang sebenarnya.	Mengingatkan pengurus barang supaya melakukan verifikasi dng perencana terkait kesesuaian pengadaan barang milik dengan standar barang; standar kebutuhan; dan/atau standar harga.	Mengingatkan pengurus barang agar berkoordinasi dengan perencana sebelum membuat usulan RKBMD.	1 TA 2024
9	Rekayasa/ Manipulasi data pada Penyewa/ Pengguna Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai secara berkala; 2. Melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja 3. Melakukan Evaluasi dan monitoring secara berkala pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pedoman SPIP yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tentang Standar Operasional Prosedur Internal di BPKA DIY Nomor 065/09327/SET tanggal 9 Desember 2021 tentang Penyusunan Penetapan Status Penggunaan BMD dan Penilaian BMD dalam rangka Pemanfaatan 2. Adanya himbauan penegakkan sanksi yang tegas jika pelaksana terbukti melakukan manipulasi atau menerima gratifikasi yang disampaikan oleh pimpinan pada saat apel atau rapat. 3. Evaluasi dan monitoring dilakukan dengan secara berkala baik terhadap pegawai maupun data pengelolaan BMD 	1 TA 2024
10	Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan/markup (Penilaian BMD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan peran pengawasan internal melalui reviu atas proses penganggaran pengadaan untuk mencegah kecurangan penganggaran PBJ; 2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam penganggaran dan penyusunan HPS PBJ; 3. Melakukan reviu/pengawasan proses penganggaran dan penyusunan HPS pengadaan barang dan jasa secara intern 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang antara lain mengatur: a) Pengadaan barang dan jasa memperhatikan prinsip efektif dan efisien; b) HPS disusun secara keahlian. 2. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tentang Standar Operasional Prosedur Internal di BPKA DIY Nomor 065/09327/SET tanggal 9 Desember 2021, antara lain mencakup Pelaksanaan Verifikasi Keuangan, Pengadaan Barang, SOP Rencana Kebutuhan Sarpras, SOP Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran, Pelaksanaan Monitoring Program Kegiatan, dan Evaluasi Program Kegiatan 	1 TA 2024

No	Deskripsi Risiko Kecurangan	Respon terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
11	Kerjasama (kongkalingkong) dengan Calon Pembeli	- Menguatkan integritas pegawai/anggota tim - Menguatkan pengendalian internal - Terus menyempurnakan SOP kegiatan pemindahtanganan melalui Penjualan Langsung	- Penjualan dilakukan dengan metode tertutup (melalui pos surat)	1 TA 2024
12	Rekayasa hasil penilaian BMD yang dijadikan sebagai Nilai Limit Penjualan		- Penilaian dilakukan oleh Penilai Publik dan Tim dengan melibatkan OPD teknis	1 TA 2024
13	Markup harga barang dan jasa	Menguatkan verifikasi usulan standar harga dari OPD	Verifikasi terhadap usulan OPD terkait usulan tarif baru maupun perubahan tarif	1 TA 2024
14	Kecurangan (Fraud) dalam penyusunan laporan keuangan.	1. Menguatkan peran pengawasan internal dengan melakukan penyusunan laporan keuangan secara terintegrasi dengan menggunakan aplikasi; 2. Melakukan reviu/pengawasan intern atas laporan keuangan yang disusun oleh subkor keuangan; 3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait penyusunan laporan keuangan; 4. Membentuk tim pencegahan kecurangan atas pengelolaan keuangan.	Koordinasi dan Rekonsiliasi data antar bidang terkait data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan	April - Juni 2024

6. Laporan SPBE (Triwulan II)

No	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
	NIHIL			

KEPALA,

 WIYOS SANTOSO, SE., M.Acc.
 NIP. [REDACTED]